



DAFTAR PUSTAKA

Adi Saputra, Permana (2017), *Tax Planning International*, Februari 2017

Cooper, Donald R. and Schindler, Pamela S. (2014), *Business Research Methods*, 12th Edition, International Edition, Singapore: McGraw Hill.

Mardiasno (2016), *Perpajakan*, Edisi terbaru 2016, Yogyakarta, Penerbit Andi Offset

OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project: *Transfer Pricing Documentation and Country-by-country Reporting*, 2015, OECD

OECD *Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations* 2010 edition, IBFD Tax Travel Companions

Republik Indonesia. 2011. *Peraturan Direktur Jendrak Pajak Tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa*. Direktur Jendral Pajak tahun 2011, PER No 32 Tahun 2011. Direktur Jendral Pajak, Jakarta.

Republik Indonesia. 2008. *Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 tahun 1983 Tentang Pajak penghasilan*. Lembaran Negara RI Tahun 2008, No. 36. Sekretariat Negara, Jakarta.

Republik Indonesia. 2016. *Peraturan Menteri Keuangan No. 213 Tahun 2016 Tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan Yang Wajib Disimpan Oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi Dengan Pihak Yang Memiliki Hubungan Istimewa dan Tata Cara Pengelolaannya*. Menteri Keuangan, Jakarta.

Republik Indonesia. 2010. *Peraturan Direktur Jendrak Pajak Tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa*. Direktur Jendral Pajak tahun 2010, PER No 43 Tahun 2010. Direktur Jendral Pajak, Jakarta.

Republik Indonesia. 2011. *Peraturan Direktur Jendrak Pajak Tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa*. Direktur Jendral Pajak tahun 2011, PER No 32 Tahun 2011. Direktur Jendral Pajak, Jakarta.

Setiawan, Hadi, 2012, "Transfer Pricing dan Risikonya Terhadap Penerimaan Negara", diakses 8 Agustus 2017, www.kemenkeu.go.id

1. Hak cipta dilindungi Undang-Undang
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin IBIKKG.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.